

Politik Luar Negeri RI dan Perkembangan Ekonomi - Politik di Asia Pasifik

Oleh :
Aleksius Jemadu.

Abstract

This paper is based on the idea that foreign policy lies at the intersection between domestic conditions of state and its international context. Since the collapse of Soeharto's authoritarian regime Indonesia's foreign policy has had to face new challenges both at the domestic and international level. The main objective of this paper is to describe how foreign policy has been used by the Indonesian government to address new issues such as economic recovery, terrorism, territorial integrity and human rights violations. It is then concluded that the complexity of those issues necessitates more cooperation between the Ministry of Foreign Affairs with other government actors as well as civil society actors.

Pendahuluan

Politik luar negeri terletak dalam irisan atau interseksi aspek domestik dan aspek internasional kehidupan suatu negara (Howard H. Lentner, 1974, p. 3). Dalam analisis politik luar negeri kita harus memperhitungkan struktur dan proses yang terjadi dalam dua aspek lingkungan tersebut. Dalam sub-bab berikut ini akan digambarkan lingkungan internasional politik luar negeri Indonesia dengan menggunakan berbagai model deskripsi untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang sejumlah determinan eksternal yang turut membentuk

kontinuitas serta perubahan yang terjadi dalam politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri tidak pernah terjadi di dalam suatu lingkungan yang vacuum, artinya konsep itu harus dipahami sebagai interaksi yang dinamis antara suatu negara dengan lingkungannya. Setiap kebijakan pemerintah, termasuk politik luar negeri, senantiasa mengandung tiga unsur utama, yaitu pemilihan tujuan, mobilisasi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan rangkaian kegiatan atau tindakan konkrit dan pengerahan sumberdaya untuk dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dimaksud (Howard H. Lentner, 1974, p. 4). Jika kita hendak menganalisis politik luar

negeri Indonesia ketiga aspek di atas harus tercakup di dalamnya.

Definisi Asia Pasifik sebagai region dalam pengertian ilmu hubungan internasional masih banyak diperdebatkan oleh para ahli. Perdebatan ini terjadi karena pendefinisian region dalam ilmu hubungan internasional tidak hanya persoalan geografis tetapi juga persepsi dan kepentingan politik dari mereka yang mendefinisikannya. Seorang mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad beranggapan bahwa kerjasama regional di Asia Pasifik hanya mencakup negara-negara Asia saja dan tidak perlu menyertakan Australia dan Amerika Serikat. Karena itu beliau mengusulkan pembentukan East Asia Economic Group (EAEG) pada awal 1990an yang kemudian melahirkan East Asia Economic Caucus (EAEC) dalam kerangka APEC. Persepsi kewilayahan Mahathir ternyata tidak lenyap begitu saja karena ternyata gagasannya menjelma menjadi apa yang dikenal dengan forum kerjasama ASEAN + 3. Tidaklah mengherankan bila Malaysia sangat bersemangat mengusulkan Kuala Lumpur sebagai sekretariat untuk forum kerjasama tersebut. Menurut Barry Buzan, wacana tentang region Asia Pasifik tidak terlepas dari strategi politik luar negeri AS pasca perang dingin yang mencegah terbentuknya regionalisme yang mengisolasi AS. Karena AS ingin

menjadi bagian dari kawasan Asia Pasifik maka diwacanakanlah adanya region dengan nama itu (Barry Buzan, 1998). Dalam tulisan ini pengertian Asia Pasifik yang digunakan adalah mencakup semua negara yang terletak dalam Pacific Rim karena mencerminkan dinamika interaksi yang nyata yang saat ini terwujud dalam kerjasama APEC (Hasnan Habib, 1995).

Model penggambaran lingkungan internasional

Penggambaran lingkungan yang merupakan sumber input atau pengaruh terhadap analisis politik luar negeri merupakan suatu langkah yang harus ditempuh bila kita ingin mengetahui konteks dari pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hubungan luar negeri. Karena lingkungan global/internasional yang merupakan arena di mana setiap aktor hubungan internasional khususnya negara-bangsa berinteraksi dan memperjuangkan kepentingannya begitu kompleks, maka diperlukan suatu penyederhanaan penggambarannya dengan menggunakan model-model deskripsi yang ada dalam literatur hubungan internasional. Dalam memilih model deskripsi yang digunakan pertimbangan pokoknya adalah dimensi atau aspek apa yang ingin kita tekankan. Berdasarkan asumsi bahwa dinamika politik dan ekonomi global khususnya di kawasan Asia Pasifik yang merupakan

lingkaran terdekat politik luar negeri RI telah berubah secara fundamental setelah perang dingin usai, maka tulisan ini terutama difokuskan pada penggambaran lingkungan tersebut sehingga politik luar negeri RI dapat ditempatkan dalam konteksnya yang nyata.

Kalau yang ingin ditekankan di sini perubahan konfigurasi dan distribusi kekuatan-kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik seperti yang terjadi di dalam interaksi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, dan ASEAN, maka model deskripsi yang ditawarkan oleh pendekatan neorealisme yang dipelopori oleh Kenneth Waltz akan sangat membantu. Berbeda dengan pendekatan realisme neoklasik yang bertolak dari sifat hakiki manusia yang *self-interested*, para neorealist beranggapan bahwa perilaku setiap negara sebagai unit-unit dalam sistem internasional sangat dipengaruhi oleh struktur yang melingkupinya. Karena itu yang menjadi perhatian utama adalah upaya mengidentifikasi karakteristik dasar dari sistem internasional yang berlaku serta pola distribusi kekuatan yang terjadi di dalamnya. Konsep-konsep utama yang digunakan adalah *distribution of power, relative capability, power structures, national survival, peace, dan security*. Berdasarkan model deskripsi ini dapat digambarkan tipe-tipe aktor yang

terlibat, isu-isu yang menonjol, proses interaksi menurut *relative capability* masing-masing aktor, perkiraan aliansi dan kemitraan strategis yang terjadi, dan analisis tentang perdamaian pada tingkat regional dan global.

Seorang neorealist yang bernama Mearsheimer (Robert Jackson and Georg Sorensen, 1999) mengemukakan teorinya tentang stabilitas internasional sesudah Perang Dingin usai. Dikatakan bahwa transformasi struktur sistem internasional dari bipolar menjadi multipolar (khususnya di Eropa) tidak dengan sendirinya menciptakan stabilitas dan perdamaian internasional. Mearsheimer bahkan menyatakan bahwa "*the demise of the bipolar Cold War order and the emergence of a multipolar Europe will produce a highly undesirable return to the bad old ways of European anarchy and instability and even a renewed danger of international conflict, crises, and possibly war*". Mengingat belum tuntasnya beberapa *trouble spots* di Asia Pacific (masalah Taiwan, Tibet, reunifikasi Korea, perlombaan senjata nuklir, kepulauan Spratley, ketegangan Indonesia - Australia, dsbnya) kondisi historis yang penuh dengan konflik dan pertentangan ideologis, maka tidak mustahil teori yang dikemukakan oleh Mearsheimer ini berlaku juga di kawasan ini. Ada tiga alasan mengapa mengapa sistem

bipolar dianggap lebih stabil dan menjamin perdamaian dalam jangkang parjang. Pertama, jumlah konflik antara negara-negara besar rendah sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perang; kedua, lebih mudah menerapkan suatu sistem penangkalan yang efektif karena lebih sedikit kekuatan-kekuatan besar yang terlibat; dan ketiga, karena hanya ada dua negara adikuasa yang mendominasi sistem, maka kecil kemungkinan terjadinya miscalculasi dan petualangan yang gegabah.

Menurut Kenneth Waltz (1979) seorang pemimpin negara akan merumuskan politik luar negerinya setelah mempelajari kendala-kendala struktural yang ada di lingkungan internasionalnya. Jadi, gagasan tentang pembentukan kemitraan strategis China, India, dan Indonesia dilihat oleh pencetusnya (Gus Dur) sebagai antisipasi yang tepat bagi Indonesia untuk pencapaian tujuan nasionalnya. Apalagi bila dikaitkan dengan *relative capability* Indonesia yang memang merosot tajam setelah dilanda krisis ekonomi yang tak kunjung pulih. Kemitraan strategis dengan China dapat dilihat sebagai upaya *engagement* yang dilakukan Indonesia mengingat China akan muncul sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan keamanan di kawasan ini. Selain itu Indonesia ingin menggandeng China

untuk mengimbangi dominasi AS. Kedudukan China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak vetonya akan merupakan faktor penting dalam diplomasi Indonesia di mana hal itu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar-menawar dengan dunia Barat khususnya AS.

Interaksi Negara-negara Besar di Asia Pasifik dan Impikasinya terhadap PLN Indonesia

Berakhirnya struktur bipolar selama Perang Dingin Asia Pasifik membawa perubahan mendasar dalam politik luar negeri dan interaksi negara-negara besar di kawasan ini. AS, misalnya, sebagai satu-satunya kekuatan negara adikuasa dapat dengan lebih leluasa menjalankan kebijakan pertahanan dan ekonominya secara komplementer. Baik ditinjau dari segi ekonomi maupun keamanan AS masih memiliki taruhan strategis di kawasan Asia Pasifik. Sejak awal 1980an telah terjadi pergeseran pola perdagangan AS di mana kawasan Asia Pasifik menjadi mitra dagang regional terbesar. Selain itu antara AS dan negara-negara di Asia Pasifik yang tergabung dalam APEC telah terjadi pertukaran penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan diperkirakan bahwa kawasan Asia Pasifik telah menjadi pasar regional yang paling menguntungkan bagi

ekspor barang dan jasa dari AS dengan membuka sebanyak 3 juta peluang kerja di sektor-sektor ekonomi yang paling maju. Perlu dicatat suatu kenyataan bahwa hubungan perdagangan dan investasi antara AS dan negara-negara competitor di Asia Pasifik telah menimbulkan gejala *geo-economic rivalry*. Karena itu tidak mengherankan kalau di mata seorang pengamat kunci untuk memahami hubungan ekonomi AS dengan kawasan ini adalah mencermati *the US geo-economic struggle for economic supremacy* (Anthony McGrew, 1998). Perlu dicatat bahwa kerjasama perdagangan di lingkungan APEC (www.bps.go.id) mengandung makna yang sangat penting bagi Indonesia karena 75.9 percent ekspor Indonesia dilakukan dengan negara-negara anggota APEC. Mengingat persaingan ekonomi yang sangat tajam di wilayah ini maka dibutuhkan kerjasama yang saling menunjang antara *sector* pemerintah dan swasta sehingga daya saing ekonomi nasional semakin kuat. Karena salah satu fungsi kebijakan luar negeri adalah menjembatani perkembangan di lingkungan eksternal dengan kepentingan nasional maka Departemen Luar Negeri beserta seluruh jajaran diplomatiknya perlu mengambil inisiatif untuk mensosialisasikan pentingnya kerjasama di atas. Perlu dicatat bahwa negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapore dan

Thailand semakin gencar menjalin apa yang dikenal dengan *Bilateral Free Trade Agreements* dengan mitra-mitra dagangnya yang tentu saja perlu diantisipasi oleh Indonesia melalui studi yang serius sejauhmana kesepakatan-kesepakatan itu mempengaruhi kepentingan ekonomi Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Singapore dan Thailand merupakan contoh adanya kerjasama yang erat antara *sector* pemerintah dan *sector* bisnis di kedua negara tersebut untuk memperluas peluang ekspor.

Di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush logika kebijakan AS di Asia Pasifik bergeser dari strategi *containment* ke kombinasi antara *cooperative security, engagement and enlargement* dan *primacy* (Anthony McGrew, 1998; Donald S. Zagoria, 1995). Yang dimaksud dengan *cooperative security* dalam konteks politik global saat ini adalah upaya AS merevitalisasi kerjasama keamanan dengan sekutu-sekutu tradisionalnya di Asia seperti Jepang, Korea Selatan dan Australia dengan focus yang baru yaitu memerangi ancaman terorisme di Asia Pasifik serta ancaman senjata nuklir Korea Utara. Kerjasama keamanan ini bahkan telah diperluas ke Asia Tenggara terutama Philipina, Singapore dan Thailand dengan maksud yang sama yaitu menghadapi ancaman terorisme di wilayah ini.

Meskipun AS sibuk dengan perang melawan terorisme gagasan penyebarluasan demokrasi dan ekonomi pasar tidak pernah ditinggalkan. Karena itu AS akan tetap mendukung proses demokratisasi di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Demikianpun liberalisasi ekonomi melalui operasi lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional tetap diupayakan. Para pembuat kebijakan luar negeri AS tetap yakin bahwa penyebarluasan demokrasi akan berdampak positif bagi terciptanya perdamaian dunia atau lebih tepat status quo dominasi global AS. Pencapaian dua tujuan di atas akan menjamin tercapainya tujuan yang ketiga yaitu *preponderance* atau *primacy* AS atas negara-negara lain di Asia Pasifik.

Dari apa yang diuraikan di atas ada beberapa catatan penting menyangkut kepentingan Indonesia. Pertama, hegemoni atau dominasi AS di Asia Pasifik merupakan suatu kebutuhan yang riil bagi negara itu karena *magnitude* kepentingan ekonomi dan keamanan yang menjadi taruhannya sangat besar. Apalagi bila dikaitkan dengan semakin kuatnya China secara ekonomi dan militer dan Jepang yang politik luar negerinya cenderung semakin *assertive*. Kedua, berkaitan dengan point yang pertama, eskalasi persaingan antara kekuatan-kekuatan besar (AS dan China, AS dan Jepang, Jepang

dan China) merupakan kecenderungan yang perlu diantisipasi karena supremasi salah satu dari ketiganya akan mudah menimbulkan kecurigaan yang lain. Ketiga, promosi pasar bebas dan demokrasi yang dipelopori AS di kawasan ini bukan lahir dari keyakinan bahwa prinsip-prinsip itu bermanfaat untuk negara-negara di Asia Pasifik tetapi karena hal itu sejalan dengan kepentingannya. AS rela mengkompromikan prinsip demokrasi dan HAM manakala kepentingan ekonominya terancam. Fleksibilitas atau inkonsistensi semacam ini terutama dilakukan terhadap China di mana pemerintah AS mendapat tekanan yang sangat kuat dari para pengusahanya untuk lebih mengutamakan kepentingan dagang daripada terlalu jauh mempersoalkan pembantaian gerakan demokrasi di Tianmen Square. Keempat, AS selalu siap menggunakan supremasi ekonominya untuk “memaksakan” kehendaknya kepada negara-negara yang dianggap melanggar norma-norma dasar seperti HAM. Cara ini sudah dilakukan AS melalui “tangan” Australia setelah jajak pendapat di Timor Timur.

Program modernisasi yang dicanangkan Deng Xiaoping sejak akhir 1970an telah mampu merubah China dari suatu negara berpenghasilan rendah menjadi calon raksasa ekonomi dunia yang diperhitungkan perannya baik pada tingkat regional maupun global. Apalagi

pertumbuhan ekonominya yang pesat diikuti pula oleh peningkatan kemampuan militernya. Tidaklah mengherankan kalau banyak pengamat berspekulasi apakah China akan menjadi ancaman baru bagi keamanan di Asia Pasifik setelah berakhirnya Perang Dingin.

Ada dua pendapat yang saling bertolakbelakang tentang hal tersebut (Denny Roy, 1998). Pendapat yang pesimis yang mengatakan bahwa China akan menjadi ancaman bagi keamanan regional di Asia Pasifik. Pendapat ini terutama dikaitkan dengan kenyataan bahwa China masih saja melakukan peningkatan kemampuan militernya meskipun rival utamanya Uni Soviet sudah bubar. Apalagi ketertutupan dan konservatisme militer China (*People's Liberation Army* atau *PLA*) membuat orang curiga bahwa Beijing memiliki niat tersembunyi untuk melancarkan politik luar negeri yang agresif.

Alasan kedua dikaitkan dengan kenyataan bahwa rezim Partai Komunis China (PKC) menganut nilai-nilai yang bertentangan dengan demokrasi dan perdamaian. Monopoli kekuasaan oleh PKC tidak sesuai dengan demokrasi, HAM dan interdependensi internasional.

Ketiga China dilihat sebagai ancaman karena secara historis negara itu menganggap dirinya sebagai pusat

alam semesta (*the undisputed political and cultural centre of the universe*). Karena itu China senantiasa ingin menjadi kekuatan dominan di Asia atau paling kurang akan melakukan perlawanan terhadap kekuatan lain yang mendominasi baik secara ekonomi maupun militer. Secara tradisi Bangsa China menolak konsep Westphalia tentang kesamaan derajat negara-negara berdaulat.

Keempat, setiap negara besar selalu cenderung untuk mendominasi dan China bukan perkecualian. Dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai sekarang ini pada suatu saat kemampuan ekonomi China akan menyamai atau bahkan melampaui negara-negara besar lainnya di Asia Pasifik. Sebagai negara besar China tidak akan mau tunduk begitu saja pada negara lain atau cenderung memaksakan kehendaknya atas negara-negara tetangganya.

Pendapat yang optimis mengatakan bahwa China bukan ancaman bagi wilayah Asia Pasifik. Pertama, karena kendala internal dan eksternal. Secara internal perhatian utama pemerintah China adalah pembangunan ekonomi. Ketergantungan China pada pasar eksternal dan sumber modal dari luar menghalangi negara itu untuk menjalankan politik luar negeri yang agresif. China berkepentingan

menjaga hubungan baik dengan mitra dagangnya. Kedua, tidak seperti bangsa Jepang dan Eropa secara historis China tidak begitu tertarik dengan penaklukan teritorial. Menurut para pemimpin China keterlibatan mereka dalam Perang Korea, pertikaian dengan Vietnam tahun 1974 dan India tahun 1962, perang dengan Vietnam tahun 1979, semuanya bertujuan untuk mempertahankan wilayah dan kepentingan China. Ketiga, peningkatan kemampuan militer China tidak bisa dikaitkan dengan tujuan hegemonik karena belanja militernya banyak dipakai untuk biaya personil dan operasional.

Bagi negara-negara ASEAN perdebatan di atas hanya menunjukkan bahwa China merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan karena menentukan stabilitas regional dan global. Karena fokus perhatian mereka masih pada pemulihan ekonomi dari krisis, maka terlalu riskan untuk mengambil sikap yang menjauhi atau memusuhi China. Justru saat inilah yang paling tepat untuk melakukan strategi engagement dengan China. Sesungguhnya China juga telah menunjukkan simpatinya kepada negara-negara Asia Tenggara yang dilanda krisis ekonomi dengan tidak melakukan devaluasi mata uangnya dan berpartisipasi dalam paket bantuan melalui IMF (Ben Dolven, 1999). China sendiri sebetulnya berkepentingan dengan stabilitas di kawasan di Asia

Pasifik sehingga pembangunan ekonominya tidak terganggu. Perlu diingat bahwa sumber legitimasi utama rezim yang berkuasa di China saat ini adalah prestasinya dalam bidang ekonomi.

Institutionalisme neoliberal dalam hubungan internasional pasca Perang Dingin

Setelah sekian lama para aktor hubungan internasional khususnya negara-bangsa berkutat dengan isu keamanan dan "power" selama Perang Dingin, maka dalam dekade 1990 dan ide-ide dari kaum neoliberal mendominasi diskursus hubungan internasional. Banyak istilah yang digunakan dalam model penggambaran lingkungan berdasarkan pemikiran kaum liberal. Misalnya, ada yang menggunakan "institutional liberalism" dan ada juga yang menggunakan "neoliberal institutionalism". Yang dimaksud dengan lembaga internasional adalah seperangkat aturan yang mengendalikan tindakan atau kebijakan negara dalam bidang tertentu seperti perdagangan dan investasi. Seperangkat aturan, norma dan prosedur yang menata hubungan antar aktor internasional itu disebut juga "*international regimes*". Rezim internasional ini tidak selamanya dilembagakan sebagai organisasi formal seperti WTO.

Menurut para *institutional liberals* lembaga-lembaga internasional mendorong terciptanya kerjasama antar negara. Derajat institusionalisasi dalam hubungan internasional dapat diukur dengan menggunakan dua dimensi, yaitu cakupan (*scope*) dan kedalaman (*depth*). Cakupan berkaitan dengan jumlah issue area yang dilembagakan dalam kerjasama internasional. Misalnya, apakah lembaga internasional yang ada hanya mencakup pengaturan perdagangan dan investasi ataukah mencakup issue area yang lain seperti militer dan bidang sosial politik lain seperti HAM dan lingkungan hidup. Untuk mengukur kedalaman dari proses pelebagaan yang terjadi tiga konsep pengukuran digunakan yaitu: *commonality*, *specifity* dan *autonomy*. Yang dimaksud dengan konsep *commonality* adalah sejauhmana unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem sepakat dalam menilai kepantasan suatu perilaku dan cara memahami perilaku satu terhadap yang lain. *Specifity* artinya sejauhmana ekspektasi anggota dinyatakan dalam bentuk aturan-aturan yang berlaku untuk semua. *Autonomy* artinya sejauhmana suatu institusi atau lembaga dapat merubah aturannya dan tidak bergantung kepada agen di luar dirinya untuk melakukan hal tersebut. Argumen utama dari kaum *institutional liberals* adalah bahwa derajat kelembagaan yang tinggi akan mengurangi efek destabilisasi dari anarkhi

yang bersifat multipolar seperti yang dikhawatirkan oleh kaum neorealist (antara lain Mearsheimer).

Dengan model penggambaran lingkungan ini kita dapat membahas sejauhmana institusi-institusi seperti WTO, APEC dan AFTA mempengaruhi politik luar negeri Indonesia dalam abad 21. Seperti diketahui kompetisi antara berbagai negara merupakan issue utama dalam arus liberalisasi perdagangan baik pada tingkat regional maupun pada tingkat global. Perlu disimak sejauh mana Departemen Luar Negeri Indonesia menghadapi persaingan dalam arus liberalisasi ini. Ada asumsi bahwa arus liberalisasi yang termanifestasi dalam berbagai institusi dan rezim internasional akan mempengaruhi bukan saja substansi politikluar negeri Indonesia tetapi juga modalitas pembuatan kebijakan luar negeri serta implementasinya. Penyesuaian apa yang dilakukan oleh Deplu untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan eksternal tersebut?

Proses globalisasi ekonomi merupakan kekuatan atau variabel yang tidak dapat diabaikan dalam menganalisis interaksi suatu negara dengan lingkungan eksternalnya. Runtuhnya sistem Bretton Woods yang menerapkan fixed exchange rates dan berakhirnya kontrol Barat atas harga dan produksi minyak. Dua peristiwa ini menandai berakhirnya "the post-war

international economic system". Dua events tersebut merupakan kekuatan besar yang mengtransformasikan perekonomian dunia secara keseluruhan. Akibat yang dapat dirasakan adalah meningkatnya pengangguran, inflasi yang tidak terkontrol, tingkat suku bunga yang tinggi, krisis utang luar negeri, integrasi ekonomi yang semakin kuat, defisit perdagangan dan anggaran yang membengkak, perubahan teknologi yang pesat, persaingan ekonomi yang semakin ketat, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi internasional. Konsep globalisasi merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hakekat dan konsekuensi dari semua perubahan itu.

Selanjutnya globalisasi mengandung beberapa unsur yang bersifat esensial. Pertama, tingkat keterlibatan yang semakin tinggi dalam perekonomian dunia. Kedua, interdependensi yang semakin tinggi. Ketiga, terbentuknya pasar, harga dan produksi pada skala global. Keempat, penyebaran teknologi dan gagasan-gagasan baru. Dipandang dari sudut studi politik luar negeri globalisasi menciptakan kendala-kendala baru bagi *nation-state* dalam mengelola perekonomiannya *vis a vis* perekonomian internasional, terjadinya pergeseran dalam pola konflik politik domestik, bentuk-bentuk produksi yang baru serta perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pola kerjasama dan

kompetisi internasional. Globalisasi dapat dipahami sebagai proses pendalaman (*deepening*) dan pengetatan (*tightening*) dari interdependensi di antara aktor-aktor dalam perekonomian dunia di mana tingkat dan hakekat keterlibatan aktor-aktor dalam proses pertukaran ekonomi internasional meningkat secara signifikan. Di sini harus dibedakan globalisasi keuangan dan globalisasi produksi. Menghadapi arus globalisasi keuangan perekonomian negara berkembang seperti Indonesia menghadapi ancaman yang disebut: "*the tyranny of the financial market*".

Pembahasan tentang globalisasi sebagai tantangan diplomasi RI pada abad 21 perlu mendapat perhatian tersendiri. Globalisasi adalah "*a process of deepening and tightening of the interdependence among actors in the world economy such that the level and character of participation in international economic relations have increased in significant ways*" (Lihat Thomas D. Lairson and David Skidmore, 1997, p. 95). Meskipun Indonesia semakin bergantung pada bantuan luar negeri dan investasi asing untuk keluar dari krisis ekonomi sekarang ini, namun itu tidak berarti bahwa bangsa Indonesia (khususnya Deplu) harus kehilangan sikap kritisnya terhadap berbagai perkembangan ekonomi-politik global. Kearifan para

founding fathers bangsa Indonesia dalam mencetuskan politik luar negeri bebas aktif di tengah konflik ideologis Barat (AS) dan Timur (Uni Soviet) hendaknya dijadikan sumber inspirasi bagi generasi sekarang untuk bersikap kritis terhadap perkembangan ekonomi politik global yang mengarah pada kejayaan prinsip-prinsip liberalisme.

Mengapa kita perlu bersikap kritis terhadap arus globalisasi yang mengutamakan prinsip pasar bebas? Pertama, globalisasi bukanlah suatu proses yang netral. Kita perlu mempertanyakan asumsi kaum liberal bahwa dalam sistem pasar bebas semua partisipan akan menjadi "beneficiaries". Kaum liberal mengabaikan kenyataan adanya "power relationships" yang tidak seimbang antara negara-negara kaya yang menguasai sumberdaya keuangan, teknologi dan informasi dengan negara-negara miskin (atau negara-negara yang dilanda krisis ekonomi seperti Indonesia). Meskipun negara-negara maju mendukung prinsip perdagangan bebas, namun perilaku politik mereka cenderung merkantilistik. Akibat yang terjadi adalah *the gains of one nation (or a group of nations) usually come at the expense of others.*

Data empiris menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara proses globalisasi dan ketimpangan ekonomi

baik pada skala global maupun nasional. Pada tahun 1800 jumlah penduduk dunia yang terkategori miskin mencapai 74 persen tetapi menikmati hanya 44 persen GDP dunia. Sementara pada saat yang sama 26 persen penduduk dunia yang kaya menguasai 56 persen GDP dunia. Pada tahun 1995 keadaannya menjadi lebih parah. Jumlah penduduk dunia yang miskin mencapai 80 persen dan hanya menikmati 20 persen GDP dunia. Sebaliknya 20 persen penduduk dunia yang kaya menikmati 80 persen GDP dunia (Nancy Birdsall, 1998, p. 77).

Ada kecenderungan yang kuat bahwa semakin bangsa kita mengintegrasikan diri ke dalam pasar global, kita menjadi semakin *indifferent* terhadap resiko atau akibat negatif yang ditimbulkannya. Sebelum krisis ekonomi terjadi lembaga-lembaga keuangan internasional memuji keberhasilan pembangunan Indonesia. Tetapi pada saat yang sama para perencana pembangunan tidak memperhitungkan resiko dari mobilisasi modal asing melalui *offshore loans* untuk *uncreditworthy and economically unproductive investments* yang mengarah pada membengkaknya utang luar negeri sektor swasta. Pada saat yang sama terjadi defisit pada current account kita yang pada gilirannya membuat mata uang rupiah menjadi sangat rentan terhadap serangan para spekulator di pasar uang.

Jadi belum lama kita menikmati sanjungan pihak lembaga keuangan internasional, dalam waktu yang singkat rakyat Indonesia menjadi yang paling menderita di kawasan ini akibat krisis ekonomi.

Bahkan ada kritik yang mengatakan bahwa IMF telah melakukan kesalahan dalam memperkirakan akibat dari penanganan krisis ekonomi di Asia Tenggara sehingga beban yang harus ditanggung rakyat Indonesia menjadi semakin berat. Perlu disadari oleh semua pihak bahwa policy IMF tidak pernah terlepas dari kepentingan negara-negara maju. Tidakkah mengherankan kalau Martin Feldstein, seorang ekonom dari Harvard University, jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa dalam mengatasi krisis ekonomi di Asia [The IMF] *should strongly resist the pressure from the United States, Japan, and other major countries to make their trade and investment agenda part of the IMF funding conditions*" (Martin Feldstein, 1998, p. 32).

Meskipun sikap kritis dan hati-hati terhadap aliran masuk kapital asing harus dimiliki oleh semua instansi pemerintahan, namun Deplu sebagai instansi penanggungjawab perumus dan pelaksana hubungan luar negeri bangsa Indonesia harus merasa terpanggil untuk melakukan analisis yang akurat dan kritis

terhadap setiap dampak dari integrasi perekonomian kita ke dalam pasar global. Untuk itu dibutuhkan struktur kelembagaan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih fleksibel dan pluralistik serta sumberdaya manusia yang semakin profesional. Jika tidak, maka bangsa kita akan terus menderita di bawah tekanan dan himpitan utang luar negeri yang semakin sulit untuk dibayar tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Adalah hal yang cukup mengherankan bahwa negara yang kaya akan sumber alam ini harus terjebak dalam apa yang disebut "*debt trap*" (Aleksius Jemadu, 1997). Dengan utang luar negeri yang membengkak sekarang ini mungkin diperlukan sampai dua atau tiga generasi untuk melunasinya.

Indonesia Pasca KTT ASEAN di Bali

Hubungan internasional pasca perang dingin dicirikan oleh munculnya berbagai bentuk kerjasama regional dan global yang saling tumpang tindih sehingga negara-bangsa dituntut untuk menyikapinya secara cerdas demi pencapaian tujuan nasionalnya. KTT ASEAN ke 9 di Bali baru-baru ini menghasilkan berbagai bentuk kerjasama regional yang baru seperti gagasan pembentukan *ASEAN Security Community (ASC)*, *ASEAN Economic Community (AEC)* dan *ASEAN Social and Cultural Community (ASCC)*. Gejala ini menunjukkan bahwa di tengah

arus globalisasi negara bangsa percaya bahwa regionalisme atau kerjasama di tingkat regional merupakan solusi yang efektif untuk berbagai masalah yang mereka hadapi.

Menurut kaum realist adanya berbagai kerjasama regional tersebut tidak berarti negara-bangsa kehilangan pengaruhnya. Justru sebaliknya, negara bangsa akan mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya melalui kerjasama regional. Dikatakan bahwa di lingkungan Uni Eropa sekalipun yang sudah mencapai integrasi moneter, pertarungan kepentingan nasional terutama antara negara-negara besar seperti Jerman dan Perancis masih akan terus terjadi. Dinamika dan kedalaman kerjasama regional, kata kaum realist, dibiarkan berlangsung sejauh negara-negara anggota merasa yakin bahwa kepentingannya terlayani atau minimal tidak terkorbankan.

Kerangka berpikir di atas akan membantu kita untuk merumuskan respons yang tepat terhadap berbagai bentuk kerjasama di lingkungan ASEAN. Memang harus diakui bahwa hasil yang dicapai melalui KTT ASEAN IX di Bali berupa penandatanganan Bali Concord II merupakan keberhasilan diplomasi Indonesia untuk memulihkan kepemimpinannya di Asia Tenggara pasca krisis ekonomi 1997. Setelah dilanda krisis ekonomi sejak tahun 1997

yang diikuti oleh berbagai kerusuhan politik dalam negeri yang tak terselesaikan, posisi kepemimpinan Indonesia di ASEAN semakin merosot. Politik luar negeri yang tidak didukung oleh *internal strength* tidak akan efektif. Antusiasme dan kepeloporan Indonesia dalam menggoalkan *Bali Concord II* dalam KTT ASEAN 2003 merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan posisi kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara yang secara tradisional dikenal dengan istilah *sense of regional entitlement* dalam politik luar negeri Indonesia (Michael R. J. Vatikiotis, 1995). Keberhasilan ini tentu saja hanya akan menjadi kebanggaan kosong apabila Indonesia sendiri tidak mampu mengambil manfaat secara optimal dari berbagai kerjasama tersebut terutama dari sudut pandang ekonomi.

Dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia jelas merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Tetapi status ini sangat kontras dengan prestasi kita secara ekonomi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Sebagai contoh, Jepang merupakan salah satu mitra dagang negara-negara ASEAN. Menurut data yang dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN, Indonesia memang tercatat sebagai negara ASEAN dengan jumlah ekspor paling tinggi ke Jepang. Tetapi kalau kita melihat peningkatannya dari tahun 1993 sampai dengan 2001 tampak bahwa negara-negara tetangga

jauh lebih agresif dari Indonesia. Pada tahun 1993 ekspor Indonesia ke Jepang sebesar kira-kira 11,2 milyar dolar AS. Tahun 2001 meningkat menjadi 13,1 milyar dolar AS atau sebesar 16%. Dalam periode yang sama Singapore mengalami peningkatan ekspor ke Jepang dari 5,5 milyar dolar AS menjadi 9,3 milyar dolar AS atau sebesar sekitar 70%. Thailand juga mengalami peningkatan yang spektakuler dari 6,4 milyar dolar AS menjadi hampir 10 milyar dolar atau sebesar 56% (<http://www.aseansec.org>) diakses tanggal 4 Februari 2004).

Untuk perdagangan intra-kawasan ASEAN terlihat jelas bahwa Singapore berada pada posisi yang dominan di mana pada tahun 2001 jumlah perdagangan intra-kawasannya mencapai 32,8 milyar dolar AS sedangkan Indonesia hanya 9,5 milyar dolar AS. Thailand memberikan kontribusi sebesar 14,3 milyar dolar AS (<http://www.aseansec.org>) diakses tanggal 4 Februari 2004). Tidaklah mengherankan kalau kedua negara ini yang paling bersemangat menjalin *Free Trade Agreement* bilateral dengan mitra dagangnya di luar ASEAN. Diperkirakan mereka akan memanfaatkan perdagangan intra-kawasan untuk mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh dari pembebasan tariff melalui mekanisme FTA bilateral. Singapore dan Thailand

juga termasuk dua anggota ASEAN yang paling bersemangat mendukung terwujudnya ASEAN Economic Community.

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa Indonesia hanya memiliki posisi ekonomi yang marginal di ASEAN dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Karena itu diperlukan strategi yang terpadu untuk mengantisipasi implementasi AEC sehingga Indonesia dapat mengoptimalkan perolehannya dari regionalisme di Asia Tenggara. Beberapa usul konkrit di bawah ini bisa dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah maupun pelaku bisnis. Pertama, sejauh ini pemerintah Indonesia belum melakukan usaha yang terpadu dan sistematis untuk menyikapi berbagai bentuk kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi. Masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, Departemen Perdagangan dan Industri lebih peduli dengan pengembangan ekspor berdasarkan komoditi. Departemen Luar Negeri melalui restrukturisasi organisasinya cenderung melakukan diplomasi kewilayahan sesuai dengan pembagian kerja berbagai direktorat jenderal yang ada. Kalau dua pendekatan birokratis ini tetap terpisah maka Indonesia sulit melakukan antisipasi yang tepat dan produktif terhadap perkembangan kerjasama regional maupun multilateral yang ada.

Dalam kaitan ini kita bisa belajar dari pengalaman AS yang memiliki pejabat khusus dalam diplomasi perdagangan internasional yang disebut US Trade Representative.

Kedua, perlu ada kesamaan visi dan misi antara pemerintah dan pelaku bisnis. Beberapa waktu yang lalu H. S. Dillon, ahli pertanian dari *Center for Agricultural Policy Studies*, dan Kusumo AM, Direktur PT Catur Yasa, mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki visi bisnis dan sekadar memberikan reaksi terhadap apa yang berkembang di lingkungan internasional (*Kompas*, 6 Oktober 2003). Hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan pelaku bisnis sifatnya bukan saling memperkuat tetapi saling memperlemah. Pelaku bisnis mengeluh tentang maraknya praktek suap yang menyebabkan terciptanya *high cost economy*. Begitu parahnya praktek suap yang ada sehingga KADIN mencanangkan Gerakan Nasional Anti Suap (GNAS) 2005–2015. Pemerintah Indonesia perlu menyadari bahwa era liberalisasi perdagangan internasional menuntut berfungsinya negara yang secara efektif menjamin *rule of law* serta perlindungan *property rights*.

Ketiga, dunia perguruan tinggi Indonesia sangat lamban dalam merespons perkembangan lingkungan ekonomi politik internasional yang

berkembang pesat. Pemerintah dan pelaku bisnis memerlukan pusat studi yang khusus mendalami WTO, ASEAN, ASEM (*Asia-Europe Meeting*), APEC dan ASEAN + 3 sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan professional tentang kiprah Indonesia dalam berbagai kerjasama tersebut. Singapore masih selangkah lebih maju dari kita sehingga negara itu tahu persis apa yang dilakukan dalam meningkatkan perdagangan internasionalnya. Tanpa adanya analisis yang mendalam tentang peluang Indonesia di berbagai arena internasional maka policy kita dari waktu ke waktu hanya bersifat *ad hoc* dan eksploitasi ekonomi oleh kekuatan-kekuatan asing akan semakin dasyat. Hanya sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis dan dunia perguruan tinggi yang dapat mencegah terjadinya gejala tersebut.

Isu Terorisme, Integritas Teritorial dan HAM dalam Diplomasi RI

Ada empat isu utama dalam pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dewasa ini yang saling berkaitan yaitu isu percepatan pemulihan ekonomi, terorisme, integritas teritorial sehubungan dengan adanya gerakan separatis di Aceh dan Papua serta isu pelanggaran HAM di kedua wilayah konflik tersebut. Sejak peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di AS dunia internasional khususnya AS melihat peran Indonesia sebagai negara

dengan penduduk Muslim terbesar di dunia perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi dunia internasional mengenal mayoritas penduduk Muslim di negeri ini beraliran moderat dan mau hidup berdampingan secara damai dengan sesama warganegara yang beragama lain. Kenyataan ini berbeda dari gambaran dunia Islam di Timur Tengah atau Asia Selatan yang berkarakter radikal dan menempuh jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Dengan demikian, di mata dunia Barat Indonesia dapat diajak kerjasama untuk menghadapi radikalisme dan sikap anti-Barat yang berkembang di kalangan negara-negara Islam. Dalam konteks ini Presiden AS George W. Bush menyambut dengan penuh antusiasme kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Washington beberapa hari setelah serangan 11 September. Bagai gayung bersambut kedua pemimpin sepakat untuk saling mendukung dan meningkatkan kerjasama dalam memerangi ancaman terorisme global. Dalam bulan Oktober 2003 Presiden Bush datang menemui Presiden Megawati di Denpasar Bali dan sekali lagi mengukuhkan kerjasama dan saling pengertian antara kedua negara dalam menyikapi ancaman terorisme global. Bahkan kali ini Presiden Bush juga mengadakan pertemuan khusus dengan tokoh-tokoh agama khususnya Islam sebagai suatu pengakuan pemerintah AS akan pentingnya peran

civil society dalam menghadapi isu politik global ini. Sebaliknya tokoh-tokoh agama Islam juga dapat mengemukakan aspirasi mereka sehubungan kebijakan luar negeri AS khususnya terhadap masalah Palestina yang menurut penilaian mereka terlalu memihak kepada kepentingan Israel.

Kebijakan luar negeri Indonesia tentang isu terorisme tidak hanya merespons tekanan AS tetapi juga lahir dari kenyataan bahwa Indonesia sendiri untuk kesekian kalinya telah menjadi korban dari aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris. Peristiwa pemboman di Bali sebagai serangan teroris dengan korban jiwa terbesar setelah 11 September 2001 dan pemboman di hotel Marriott Jakarta pada 5 Agustus 2003 tidak hanya memakan korban jiwa tetapi sangat merugikan reputasi Indonesia di dunia internasional yang kemudian berdampak pada industri pariwisata dan investasi asing. Karena itu Indonesia sendiri berkepentingan untuk memerangi terorisme internasional demi menjaga keamanannya serta pemulihan ekonomi jangka panjang. Selain itu pemerintah Indonesia tentu tidak ingin kebijakan dalam dan luar negerinya didikte oleh kelompok-kelompok radikal karena mereka hanya merupakan minoritas dan sama sekali tidak mewakili kelompok mayoritas Islam yang toleran dan cinta damai. Menurut Juwono Sudarsono

sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia Islam di negara-negara lain dalam hal mengembangkan kehidupan keagamaan yang inklusif dan demokratis (Juwono Sudarsono, 2003).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang perlu dalam menghadapi ancaman terorisme baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ke dalam negeri, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundangan yang mengatur tindak pidana terorisme sebagai payung hukum bagi pemerintah. Untuk itu pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1/2002 yang mengatur tindak pidana terorisme, UU Nomor 15/2002 tentang pencucian uang dan Instruksi Presiden Nomor 4/2002 tentang pembentukan semacam badan koordinasi di lingkungan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang menangani isu terorisme. Selain menciptakan infrastruktur hukum yang memadai Indonesia juga telah melakukan langkah *law enforcement* dengan menjalankan peradilan terhadap pelaku bom Bali dan Hotel Marriott dengan cara yang transparan dan obyektif sehingga dapat dimonitor oleh dunia internasional. Langkah-langkah yang ditempuh ke luar negeri mencakup pembuatan laporan pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri ke *Counter Terrorism Committee (CTC)* dari

Dewan Keamanan PBB sebagai tindak lanjut kepatuhan Indonesia terhadap Resolusi DK PBB Nomor 1373 sehubungan dengan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk memerangi terorisme global. Selain itu Indonesia juga giat menjalin kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam mneghadapi ancaman terorisme internasional. Misalnya, Indonesia telah menandatangani kerjasama di lingkungan ASEAN, APEC dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Mengingat pentingnya peran Indonesia dalam memerangi terorisme global, maka hal ini bisa dijadikan sebagai kekuatan *bargaining* Indonesia dalam diplomasinya dengan dunia Barat khususnya AS demi pencapaian tujuan-tujuan politik luar negeri yang lain seperti pembayaran utang luar negeri dan dukungan bagi integritas wilayah Indonesia. Tetapi perlu dicatat bahwa posisi yang penting ini bisa menjadi boomerang bagi politik luar negeri bila pemerintah dan rakyat Indonesia tidak mampu mengendalikan atau mengontrol gerakan-gerakan Islam radikal yang berkembang di Indonesia. Resiko yang dihadapi adalah Indonesia akan dikucilkan dalam pergaulan internasional terutama oleh negara-negara donor yang sangat mengharapkan partisipasi Indonesia dalam memerangi terorisme atas nama agama.

Meskipun dunia Barat khususnya AS tidak lagi “ngotot” menekan Indonesia dalam soal HAM sehubungan dengan munculnya isu yang lebih mendesak yaitu terorisme itu tidak berarti bahwa Indonesia boleh mengabaikan isu HAM dalam politik luar negerinya. Bagaimanapun kelompok-kelompok tertentu dalam Kongres AS masih sering mempersoalkan isu-isu pelanggaran HAM baik di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 maupun di Papua dan Aceh. Isu-isu HAM ini masih mengganjal pemulihan hubungan secara komprehensif dengan AS khususnya yang berkaitan dengan izin pembelian suku cadang militer dari AS. Negara-negara European Union juga masih mempersoalkan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Aceh. Baik AS maupun Uni Eropa dan Jepang secara eksplisit tidak menyetujui langkah pemberlakuan darurat militer di Aceh dan dalam berbagai kesempatan meminta pemerintah Indonesia untuk segera kembali ke meja perundingan guna menempuh jalan dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah Indonesia tidak bisa mengabaikan begitu saja tuntutan internasional menyangkut masalah HAM ini mengingat pentingnya dukungan negara-negara donor ini terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Di samping itu kritik terhadap pelanggaran HAM di Aceh dan Papua yang dilancarkan oleh NGO internasional tidak bisa diabaikan begitu saja.

Misalnya, baru-baru ini Human Rights Watch (HRW) menerbitkan laporan seputar pelanggaran HAM di Aceh sejak diberlakukannya darurat militer di propinsi tersebut. Meskipun Departemen Luar Negeri RI telah membantah keabsahan dari laporan itu namun dampaknya akan merugikan diplomasi HAM RI di luar negeri (<http://www.hrw.org>) diakses tanggal 4 Februari 2004).

Sehubungan dengan terus bergolaknya gerakan separatis di Aceh dan Papua, salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia saat ini adalah memperkuat pengakuan dunia internasional terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejauh ini AS, Jepang, Australia, EU dan bahkan PBB tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayahnya meskipun mereka tetap mempersoalkan pelanggaran HAM di Aceh dan Papua. Pengakuan mereka merupakan modal diplomatic bagi Indonesia untuk menghadapi jaringan internasional yang digalang oleh gerakan-gerakan separatis baik di Aceh maupun Papua. Yang penting dicatat adalah diplomasi Indonesia terhadap negara-negara di Pasifik Selatan yang masyarakatnya memiliki kedekatan antropologis dan budaya dengan masyarakat Papua. Dukungan terhadap kedaulatan Indonesia dari negara-negara di Pasifik Selatan sangat penting bagi

Indonesia dan karena itu perlu dicegah eskalasi konflik dan kekerasan di Papua. Sejauh ini pemerintah telah mengembangkan tiga struktur hubungan baru dengan negara-negara Pasifik Barat Daya yang mencakup Tripartite Consultation (Indonesia, Timor Leste dan Australia), pembentukan *South- West Pacific Dialogue* dan partisipasi Indonesia dalam *Pacific Islands Forum* (Y. Kristiarto Legowo, 2004). Untuk melengkapi komunikasi atau dialog pada level pemerintahan ini masih perlu dikembangkan interaksi pada level societal yang tidak kalah pentingnya mengingat ikatan emosional-kultural masyarakat Papua dengan masyarakat di negara-negara tersebut. Selain itu dalam semangat otonomi khusus bagi Papua biarkanlah rakyat Papua menentukan model pembangunan yang sesuai dengan budayanya serta menikmati kekayaan alamnya. Bagaimanapun tantangan yang dihadapi oleh Presiden Megawati saat ini dan yang akan datang adalah kenyataan bahwa kebijakan luar negeri tidak lagi menjadi ranah yang dimonopoli oleh eksekutif. Lembaga legislative dan kekuatan-kekuatan dalam civil society juga akan turut berperan dan menentukan arah dan tujuan politik luar negeri Indonesia (Dewi Fortuna Anwar, 2003).

Penutup

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto yang disusul oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan politik luar negeri Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks baik dari dalam negeri maupun dari lingkungan internasionalnya khususnya di Asia Pasifik. Tantangan terbaru yang dihadapi adalah menghadapi ancaman terorisme internasional mengingat posisi Indonesia yang unik menyangkut isu ini. Selain Indonesia menjadi asal dari beberapa tokoh teroris yang terkenal luas seperti Hambali dan Amrozi dan kawan-kawan yang terlibat dalam bom Bali Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar yang dikenal moderat dan toleran. Isu terorisme tidak bisa dipisahkan dari isu ekonomi dan karena itu perlu ditangani secara simultan. Kawasan Asia Pasifik secara ekonomi sangat penting karena sebagian besar mitra dagang Indonesia ada di wilayah ini. Persaingan dagang dan investasi merupakan tantangan yang harus dihadapi. Pada saat yang sama politik luar negeri Indonesia perlu memberi perhatian pada isu pelanggaran HAM yang masih menjadi sorotan internasional dan pengakuan internasional terhadap keutuhan wilayah negara kesatuan. Menghadapi tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks Departemen Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi RI membutuhkan

dukungan dan kerjasama baik dari instansi-instansi pemerintah yang lain maupun dari aktor-aktor non-pemerintah. Pada saat yang sama Departemen Luar Negeri dituntut untuk terus menjalin komunikasi yang interaktif dengan instansi-instansi yang lain terutama melalui pemberdayaan diplomasi publik yang perannya semakin mendesak di tengah arus demokratisasi dan liberalisasi politik saat ini.

Daftar kepustakaan:

Anwar, Dewi Fortuna, "Megawati's Search for an Effective Foreign Policy" dalam Hadisusastro, Anthony L. Smith and Han Mui Ling (eds.), *Governance in Indonesia: Challenges Facing the Megawati Presidency*, Singapore: ISEAS, 2003.

Ben, Dolven, "Softly, Softly", *Far Eastern Economic Review*, June 10, 1999.

Birdsel, Nancy, "Life is unfair, ine quality in the world", *Foreign Policy*, Summer, 1998.

Buzan, Barry, "The Asia Pacific: What Sort of Region in What Sort of World", in in Anthony McGrew and Christopher Brook (eds.), *Asia-Pacific in the New World Order*, London: Routledge, 1998.

Directorate of International Security and Disarmament, Department of Foreign Affairs, "Report to the Counterterrorism Committee (CTC) of the United Nations Security Council Pursuant to Paragraph 6 of Security Council Resolution 1373", 1st-3rd Report, Jakarta, 2003.

Feldstein, Martin, "Refocusing the IMF", *Foreign Affairs*, March /April 1998.

Habib, Hasnan, A., "Defining the 'Asia Pacific Region'", in Hadi Susastro and Anthony Bergin (eds.), *The Role of Security and Economic Cooperation Structures in the Asia Pacific Region* (Jakarta: CSIS, 1996) pp.3-11

Jackson, R and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press, 1999).

Kompas, 6 Oktober 2003.

Jemadu, Aleksius, "Can we avoid a debt trap?", *The Jakarta Post*, 24 July 1997.

Lairson, Thomas D and David Skidmore, *International Political Economy* (Orlando: Harcourt Brace and Company, 1997).

Legowo, Y. Kristiarto, S., "Perkembangan Terkini Politik Luar Negeri RI", makalah yang disajikan dalam kuliah umum di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNPAR Bandung, 7 Februari 2004.

McGrew, Anthony, "Restructuring foreign and defence policy: the USA" in Anthony McGrew and Christopher Brook (eds.), *Asia-Pacific in the New World Order*, London: Routledge, 1998.

Roy, Denny, "Restructuring foreign and defence policy: the People's Republic of China", in Anthony McGrew and Christopher Brook (eds.), *Asia-Pacific in the New World Order*, London: Routledge, 1998.

Sudarsono, Juwono, "Tiga Sorotan Luar Negeri terhadap RI", *Kompas*, 29 Oktober 2003.

Vatikiotis, Michael, R. J., "A Giant Treads Carefully: Indonesia's Foreign Policy in the 1990s"

dalam Robert S. Ross (ed.), *East Asia in Transition*, Singapore: ISEAS, 1995.

Waltz, Kenneth, N., *Theory of International Politics*, New York: McGraw Hill; Reading: Addison-Wesley, 1979.

Zagoria, Donald S., "The United States and the Asia-Pacific Region in the Post-Cold War World", in Robert S. Ross (ed.), *East Asia in Transition*, Singapore: ISEAS, 1995.

Websites:

<http://www.bps.go.id>

<http://www.aseansec.org>

<http://www.hrw.org>